

Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul

Oleh:
Rina Puji Kartika
515011414

Penatausahaan barang milik daerah salah satu kegiatan yang penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah. Tujuan dari penatausahaan untuk melaksanakan tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif serta data yang digunakan sekunder dan primer. Hasil dari analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri No. 19 tahun 2016 serta Penggolongan dan Kodifikasi barang atas Kartu Inventaris Barang (KIB) ada yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016. Kesimpulan ini didapat dari proses analisis data yang diperoleh dengan membandingkan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Kata Kunci: Penatausahaan barang milik daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dan No. 108 Tahun 2016.

Evaluation Of The Administration Of The Local Property
On The Entity And Financial Assets Regional
Government Of Bantul Regency

Rina Puji Kartika
515011414

Administration of the local property is one of the important activities in the management of assets / property belonging to the region. The purpose of administration is to carry out administrative order in accordance with applicable regulations. The research method used is descriptive qualitative using primary and secondary data. Results of analysis and discussion of goods implementation owned by the region in the Entity and Financial assets Regional Government of Bantul Regency, show that the administration of regional property in the Entity and Financial Assets Regional Government of Bantul Regency is in accordance with Permendagri Regulation No. 19 of 2016; and Classification and Codification of goods on Goods Inventory Cards (KIB), some of which are not yet in accordance with Regional Government Regulations No.108 of 2016. This conclusion is obtained from the process of data analysis obtained by comparing with applicable Government Regulations.

Key words: Administration of regional property, Minister of Home Affairs Regulation No.19 of 2016 and No.108 of 2016